

# Bab Satu

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu dari 34 provinsi di Indonesia, terletak di sebelah selatan Negara Republik Indonesia berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste, Australia dan Selandia Baru. NTT merupakan salah satu provinsi kepulauan dengan luas laut 200.000 km<sup>2</sup>, dan daratan 47.349,9 km<sup>2</sup> memiliki 1.192 pulau. Pulau yang sudah bernama sejumlah 432 namun hanya 43 pulau yang berpenghuni, sehingga ada 389 yang belum berpenghuni tapi sudah bernama dan 760 pulau belum bernama dan belum berpenghuni sehingga terdapat 1.149 pulau yang perlu diperhatikan pemerintah di masa yang akan datang (BPS Prov. NTT, 2016). Sebagai provinsi kepulauan, NTT memiliki sumber daya alam, terutama sumber daya alam kelautan.

Sumber daya alam, terutama laut dan pertambangan yang melimpah sangat berpotensi dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi lainnya adalah kehutanan dan peternakan, perkebunan, pertanian. Sedangkan perkembangan sektor industri kecil masih rendah di mana dalam sepuluh tahun ini kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) NTT tidak melampaui 2%, sehingga tidak memberi perubahan secara signifikan terhadap struktur ekonomi daerah (BPS Prov NTT, 2016).

Struktur ekonomi adalah gambaran dari kondisi ekonomi daerah yang menampilkan wajah dari kondisi masyarakat di daerah tersebut. Secara nasional Negara Republik Indonesia berhasil keluar dari keterbelakangan seperti dialami oleh negara-negara dunia ketiga karena struktur ekonomi negara yang menempatkan sektor industri

pengolahan sebagai basis pembangunan negara. Sektor industri pengolahan sebagai sektor sekunder memberikan kontribusi terbesar, dan besarnya prosentase kontribusi sektor ini memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun berbanding terbalik dengan Provinsi NTT yang masih menempatkan sektor pertanian sebagai basis pembangunan daerah. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur dan Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Perbandingan Distribusi Presentasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2011-2013

No	Lapangan Usaha	NTT			Indonesia		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013
1.	Pertanian	35,92	35,15	34,18	12,78	12,53	12,57
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,33	1,35	1,34	7,72	7,37	7,06
3.	Industri Pengolahan	1,43	1,42	1,38	25,72	25,59	25,54
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,45	0,45	0,46	0,77	0,77	0,77
5.	Bangunan/Konstruksi	6,24	6,37	6,34	6,46	6,52	6,57
6.	Perdagangan	17,47	17,76	18,19	17,75	18,06	18,09
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	7,51	7,52	7,52	9,79	10,13	10,56
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,89	3,97	4,10	9,58	9,66	9,82
9.	Jasa - jasa	25,77	26,02	26,50	9,44	9,35	9,32
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS NTT, Berita Resmi Statistik, 2014.

Dari tabel di atas, kondisi NTT berbanding terbalik dengan kondisi nasional. Pada tahun 2011- 2013 lapangan usaha yang berada pada tataran pertama sumbangannya pada PDRB nasional terbesar adalah sektor industri pengolahan, diikuti dengan sektor perdagangan,

hotel, restoran, sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan di peringkat ketiga. Tiga sektor lain pada tataran kedua yang hampir setara adalah sektor keuangan, *real estate*, jasa perusahaan, sektor jasa lain, sektor pengangkutan dan komunikasi. Pada tataran ketiga adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan sektor konstruksi, sedangkan sektor listrik, gas, dan air bersih hanya menyumbang 0,77 %, sementara di NTT yang terbesar adalah sektor pertanian. Prosentasi real kontribusi sektor industri pengolahan secara nasional melampaui 25 % sedangkan NTT nyaris minus (BPS NTT, Berita Resmi Statistik, 2014).

Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada tahun 2014 dan 2015 yang menggunakan perhitungan klasifikasi PDRB tidak sama dengan tahun 2011 s/d 2013 yang berdasarkan tahun dasar 2000 (9 lapangan usaha) tetapi menurut lapangan usaha tahun dasar 2010 (18 lapangan usaha)

Struktur perekonomian wilayah NTT pada dasarnya merupakan perekonomian agraris yang dicirikan dengan besarnya peranan sektor pertanian. Seperti dapat dilihat dari Tabel 1.2 bahwa perekonomian NTT memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sektor pertanian.

Tabel 1.2 Distribusi Presentasi PDRB Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga yang Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2011 – 2013

Lapangan Usaha	2011	2012	2013
1. Pertanian	36,97	35,95	35,15
2. Pertambangan dan Penggalian	1,36	1,37	1,34
3. Industri Pengolahan	1,51	1,50	1,46
4. Listrik, Gas dan Air Minum	0,44	0,43	0,45
5. Bangunan / Konstruksi	6,99	7,20	7,15
6. Perdagangan, Restoran, Hotel	17,26	17,70	18,33
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,67	5,68	5,68
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,24	4,28	4,37
9. Jasa – jasa	25,55	25,89	26,07
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber BPS NTT. Berita Resmi Statistik 2014*

Pada tahun 2011 sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB NTT mencapai 36,97%. Peranan sektor ini cenderung semakin menurun ketika perekonomian NTT semakin membaik. Peranan sektor pertanian pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 35,95% dan terus menurun menjadi 35,15% pada tahun 2013 dan di tahun 2014 terjadi perubahan klasifikasi dari PDRB tahun dasar 2000 ke PDRB tahun dasar 2010.

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Distribusi PDRB berdasarkan lapangan usaha berubah dari 9 lapangan usaha menjadi 18 lapangan usaha sebagai berikut (1)Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2)Pertambangan dan Penggalan; (3)Industri Pengolahan; (4)Pengadaan Listrik dan Gas; (5)Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah; (6)Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9)Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11)Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16)Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (17) Jasa lainnya sampai dengan tahun 2015 sesuai dengan perhitungan tahun dasar 2010.

Sektor lain yang peranannya cukup besar dalam perekonomian NTT adalah sektor jasa-jasa, perdagangan, bangunan dan pengangkutan. Peranan sektor jasa-jasa pada tahun 2012 mencapai 25,89% dan meningkat menjadi 26,07 % pada tahun 2013 dan juga di tahun 2015. Sementara peranan sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai 17,70%. Tahun 2012 semakin meningkat hingga menjadi 18,33% pada tahun 2013 dan juga di tahun 2015. Demikian juga peranan sektor bangunan cenderung menurun, dari 7,20 % menjadi 7,15% selama tahun 2013 dan juga di tahun 2015. Peranan sektor pengangkutan dan komunikasi cenderung stabil, yaitu 5,68% pada tahun 2012 dan tetap 5,68% tahun 2013 dan juga di tahun 2015.

Sektor – sektor selain yang telah dibahas memiliki peranan yang relatif kecil terhadap pembentukan PDRB NTT.

Berdasarkan ulasan tersebut di atas jelas bahwa dalam kurun 2011 – 2015 belum terjadi pergeseran struktur ekonomi yang cukup signifikan di NTT. Sektor pertanian masih mendominasi perekonomian NTT. Sektor tersier yang dimotori oleh sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan peranannya relatif stabil. Sedangkan sektor sekunder dengan motor utama sektor industri pengolahan relatif belum menunjukkan pergerakan yang berarti dalam menunjang perekonomian NTT.

Pertumbuhan ekonomi NTT secara umum masih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.3 di bawah ini yang menyajikan perbandingan pertumbuhan ekonomi NTT dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional periode 2011 – 2015.

Pertumbuhan ekonomi NTT pada Tahun 2011 masih sebesar 5,62% sedangkan nasional sudah mencapai 6,49%. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT menurun menjadi 5,41% sementara perekonomian nasional juga menurun menjadi 6,26%, kemudian pada tahun 2013 perekonomian NTT mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 5,56%, dan di tahun 2015 menurun keangka 5,02 % sedangkan nasional semakin menurun menjadi 5,78%. dan 4,88 % di tahun 2015.

Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi per Tahun di Nusa Tenggara Timur dan Nasional 2011 – 2015

Periode	Nusa Tenggara Timur (%)	Nasional (%)
2011	5,67	6,49
2012	5,46	6,26
2013	5,41	5,78
2014	5,05	5,01
2015	5,02	4,88

Sumber : BPS NTT, Berita Resmi Statistik 2016.

## Pendapatan Per Kapita

PDRB suatu wilayah sebenarnya hanya menunjukkan ukuran ekonomi dari wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian PDRB kurang dapat dipergunakan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah. Salah satu ukuran yang umum dipergunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk adalah pendapatan per kapita, yaitu rata-rata pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk.

Secara umum pendapatan per kapita penduduk Provinsi NTT terus meningkat sehingga pada tahun 2013 telah mencapai Rp7.569.168, meski kenaikannya masih jauh jika dibandingkan pendapatan per kapita nasional sampai dengan tahun 2015. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.4 di bawah ini, di mana pada tahun 2011 pendapatan per kapita Provinsi NTT Rp 6.073.871 sedangkan nasional sudah mencapai Rp 32.363.700. Demikian halnya pada tahun 2012 di mana pendapatan per kapita NTT sebesar Rp 6.715.574 sedangkan nasional sudah mencapai Rp 35.105.200.

Tabel 1.4 Pendapatan Per Kapita Penduduk Nusa Tenggara Timur dan Nasional 2011 – 2015

Tahun	Nusa Tenggara Timur (Rp)	Nasional (Rp)
2011	6.073.871	32.363.700
2012	6.715.574	35.105.200
2013	7.569.168	38.365.900
2014	10.741.985	41.900.400
2015	11.097.543	45.176.200

Sumber : BPS NTT Berita Resmi Statistik, 2016

## Pendapatan Per Kapita Kabupaten/Kota

Pendapatan perkapita penduduk NTT antarkabupaten / kota cukup bervariasi. Pendapatan per kapita tertinggi pada tahun 2013 adalah di Kota Kupang, yaitu sekitar Rp16.641.732, sementara yang terendah adalah Kabupaten Sumba Barat Daya yang hanya sebesar Rp 4.356.311. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.5 di bawah ini.



Tabel 1.5 Pendapatan Per Kapita Nusa Tenggara Timur Menurut Kabupaten/  
Kota 2011 – 2013

Tahun	2011	2012	2013
01. Sumba Barat	6.741.141	7.532.861	8.399.515
02. Sumba Timur	6.756.898	7.484.679	8.236.127
03. Kupang	7.342.166	7.995.625	8.663.196
04. Timor Tengah Selatan	5.311.033	5.969.397	6.665.501
05. Timor Tengah Utara	4.260.614	4.701.140	5.102.200
06. Belu	5.599.845	6.114.142	6.743.647
07. Alor	4.547.857	5.040.934	5.570.296
08. Lembata	3.671.132	4.094.301	4.613.736
09. Flores Timur	6.279.282	6.901.833	7.621.786
10. Sikka	5.896.649	6.443.202	7.176.036
11. Ende	6.856.365	7.762.651	8.781.525
12. Ngada	6.915.993	7.595.464	8.413.591
13. Manggarai	4.395.043	4.856.940	5.396.608
14. Rote Ndao	4.978.213	5.218.187	5.578.236
15. Manggarai Barat	4.673.686	5.037.644	5.451.043
16. Sumba Barat Daya	3.439.852	3.848.549	4.356.311
17. Sumba Tengah	5.033.201	5.621.071	6.230.283
18. Nagekeo	5.545.479	6.140.918	6.818.814
19. Manggarai Timur	3.629.458	4.143.219	4.676.438
20. Sabu Raijua	4.913.472	5.670.986	6.142.258
21. Malaka	4.873.528	5.284.279	5.770.083
22. Kota Kupang	13.058.381	14.529.800	16.641.732
Nusa Tenggara Timur	6.073.871	6.715.574	7.569.168

Sumber : BPS NTT, Berita Resmi Statistik, 2016

Pendapatan per kapita kabupaten/kota di lokasi penelitian menunjukkan Kota Kupang adalah yang tertinggi, diikuti Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

## Potensi Daerah

Letak astronomis Provinsi NTT seluruhnya berada di selatan katulistiwa, pada posisi  $8^{\circ}$ – $12^{\circ}$  lintang selatan dan  $118^{\circ}$ – $125^{\circ}$  bujur timur. Jarak utara-selatan membentang sepanjang  $4^{\circ}$  dan jarak barat-timur sepanjang  $7^{\circ}$ , sehingga NTT berada pada zona iklim tropik yang sangat tipikal. Musim kemarau antara 8–9 bulan sedangkan musim penghujan 3–4 bulan. Curah hujan berada pada kisaran 800–3000

mm/tahun dengan panjang hari hujan rata-rata 100 hari/tahun. Suhu minimum dan maksimum berkisar antara 23–34° C (BPS NTT, 2016).

Topografis NTT berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara sporadis pada luasan yang sempit. Pada semua pulau dominan permukaannya berbukit dan bergunung-gunung, dataran-dataran yang sempit memanjang pantai atau diapit oleh dataran tinggi atau sistem perbukitan. Lahan dengan kemiringan 15 – 40° mencapai luasan 38,07% dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40° mencapai 35,46%. Kondisi geomorfologis yang demikian menyebabkan pertanian pada dataran sangat terbatas baik pertanian basah maupun lahan kering. Pertanian lahan kering banyak dilakukan pada daerah-daerah dengan kemiringan yang curam sehingga produktivitas menjadi rendah (BPS NTT, 2016).

Provinsi NTT sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian utama di sektor pertanian. Akan tetapi potensi sumber daya alam di wilayah dataran yang dapat digarap masih terbatas. Hal ini disebabkan karena sebagian besar jenis tanah di kabupaten/kota miskin hara, tutupan lahan  $\pm 14$  % dari luas wilayah, topografis wilayah didominasi oleh perbukitan, sehingga menyebabkan tradisi pengolahan lahan dengan pola *shifting cultivation* (tebas bakar) menjadi pilihan petani. Peran sektor pertanian cenderung terus menurun dari tahun 2011 sampai dengan 2012 yaitu dari 36,97 % menjadi 35,15% di tahun 2013 dan di tahun 2015 penurunannya menembus angka 29,65 % (BPS NTT, 2016).

## Penduduk

Dalam dua dekade terakhir tingkat perkembangan penduduk di Provinsi NTT terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Pada tahun 1980, jumlah penduduk NTT sebanyak 2,74 juta orang, meningkat menjadi 3,88 juta orang pada tahun 2000. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, Penduduk NTT menjadi 4,679,316 orang, yang terdiri dari 2,323,534 penduduk laki-laki dan 2,355,782 penduduk perempuan (BPS NTT, 2010). Ini berarti bahwa dalam kurun



waktu 1980-2000 telah terjadi penambahan penduduk sekitar 1 juta orang, dan dalam kurun waktu 2000-2010 terjadi penambahan penduduk sebanyak lebih dari 799 ribu orang. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kabupaten Sumba Tengah adalah yang terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di NTT yakni sebanyak 62.510 orang sementara Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 440.470 orang. Pada tahun 2013 terjadi perubahan penduduk NTT yaitu berjumlah 4.953.967 orang yang terdiri dari 2.455.068 laki-laki dan 2.498.899 perempuan dan pada tahun 2015 total penduduk bertambah menjadi 5.120.061 orang seperti nampak pada Tabel 1.6.

Dengan persebaran penduduk yang tidak seimbang, maka kepadatan penduduk antarkabupaten menjadi beragam. Kabupaten Sumba Timur merupakan kabupaten dengan kepadatan penduduk terendah, yaitu hanya 34 orang per km<sup>2</sup> pada tahun 2013, sebaliknya Kota Kupang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 2.296 orang per km<sup>2</sup>.

Terbatasnya lahan pertanian yang subur dan rendahnya produktifitas lahan, maka tingkat kepadatan agraris di NTT terutama di beberapa kabupaten menjadi salah satu kendala dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Berkaitan dengan komposisi umur dan jenis kelamin penduduk NTT, di masa depan akan lebih banyak dipengaruhi oleh arah perkembangan kelahiran dan kematian karena penduduk yang keluar dan masuk NTT dapat dikatakan relatif seimbang. Jika tingkat kematian turun sedangkan tingkat kelahiran tetap tinggi, maka bagian penduduk yang tergolong usia muda akan meningkat sehingga pada gilirannya akan menambah angka beban tanggungan. Kondisi ini akan mengganggu percepatan akselerasi pembangunan karena dengan jumlah penduduk yang besar, maka sebagian besar sumber daya pembangunan akan terserap untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Tabel 1.6 Penduduk NTT Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013 - 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		
		2013	2014	2015
1.	Sumba Barat	117.787	119.907	121.921
2.	Sumba Timur	240.190	243.009	246.294
3.	Kupang	328.688	338.415	348.010
4.	TTS	451.922	456.152	459.310
5.	TTU	239.503	242.082	244.714
6.	Belu	199.990	203.284	206.778
7.	Alor	196.613	198.200	199.915
8.	Lembata	126.704	129.482	132.171
9.	Flotim	241.590	244.485	246.994
10.	Sikka	309.008	311.411	313.509
11.	Ende	266.909	268.314	269.724
12.	Ngada	150.186	152.519	154.693
13.	Manggarai	309.614	314.491	319.607
14.	Rote Ndao	137.182	142.106	147.778
15.	Manggarai Barat	240.905	245.817	251.689
16.	Sumba Tengah	66.314	67.393	68.515
17.	Sumba Barat Daya	306.195	312.510	319.119
18.	Nagekeo	136.201	137.919	139.577
19.	Manggarai Timur	264.979	268.418	272.514
20.	Sabu Raijua	80.897	83.501	85.970
21.	Malaka	174.391	177.395	180.382
22.	Kota Kupang	368.199	380.084	390.877
<b>Nusa Tenggara Timur</b>		<b>4.953.967</b>	<b>5.036.897</b>	<b>5.120.061</b>

Sumber data : BPS NTT.Berita Resmi Statistik 2016

## Angkatan Kerja

Distribusi prosentase penduduk NTT yang bekerja tahun 2012 pada sektor primer sebesar 61,61% dan tahun 2013 sebesar 61,04% turun sebanyak 0,57%, sementara pada sektor tersier terjadi peningkatan dari 25,42% pada tahun 2012 ke 26,88% tahun 2013 dan sektor sekunder relatif tidak berubah posisinya dalam menyerap tenaga kerja yaitu tidak lebih dari 13 %. Besarnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dikarenakan oleh posisi sektor pertanian di daerah pedesaan sebagai “katub pengaman” masalah lapangan pekerjaan. Dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan

maka praktis setiap tambahan angkatan kerja baru “terpaksa” bekerja di sektor primer tersebut.

Kenaikan prosentase pada sektor tersier menunjukkan minat tenaga kerja yang lebih besar ke sektor tersier dan bukan kepada sektor industri pengolahan sebagai sektor sekunder yang disebabkan oleh salah satunya karena dukungan rendahnya keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja sehingga lebih memilih sektor jasa dan perdagangan sebagai alternatif pekerjaan. Kondisi ini juga menunjukkan secara temporer bila tersedia alternatif lapangan kerja lain seperti menjadi buruh di sektor konstruksi, industri maupun perdagangan maka transformasi lapangan pekerjaan akan segera berlangsung secara “semu” dan pada gilirannya para pekerja tersebut kembali menggeluti sektor pertanian sebagai sektor asalnya.

Profil angkatan kerja NTT dalam mendukung kegiatan ekonomi didominasi oleh pekerja informal yaitu sebesar 79,43%, kondisi ini disebabkan tingkat pendidikan yang relatif rendah, sebesar 67,54% penduduk berusia 10 tahun ke atas memiliki pendidikan sekolah dasar kebawah, dan hanya 4,46% yang memiliki pendidikan di perguruan tinggi (BPS NTT. Berita Resmi Statistik, 2014).

Angkatan kerja di NTT umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah di mana pendidikan rata-rata angkatan kerja adalah belum pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Hal ini menjadi salah satu penyebab lambannya proses penyerapan tenaga kerja ke sektor-sektor lain selain sektor pertanian. Fluktuasi angka penyerapan tenaga kerja di sektor industri merupakan indikasi bahwa tenaga kerja pada sektor ini merupakan tenaga buruh atau yang berkeahlian rendah sehingga mudah untuk di-PHK ketika sektor industri ini mengalami penurunan produksi.

## Kondisi Makro Ekonomi NTT

Pendapatan per kapita NTT memang sangat kecil namun hal ini perlu dilihat secara bijak karena sebagian besar penduduk NTT

bekerja dalam sektor pertanian dengan sistem subsistem yang berarti bahwa segala kebutuhan hariannya tidak ada dalam bentuk uang bulanan namun dipenuhi dengan memetik atau menuai dari kebun atau sawah mereka. Dengan penduduk miskin sebesar 993.560 orang atau 20,03% masih ada harapan untuk menurunkan prosentase tersebut dengan berbagai program pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat (BPS NTT.Berita Resmi Statistik 2016).

Pengangguran terbuka merupakan penduduk yang menjadi angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka di NTT tergolong tidak besar dari sisi prosentase karena masih di bawah 5% kecuali tahun 2005. Namun hal ini tetap perlu disikapi dengan bijak karena walaupun pengangguran terbuka sedikit namun penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan produktivitas yang sangat rendah masih tinggi yaitu 68,15%. Sebenarnya tidak masalah dengan orang yang bekerja di sektor pertanian namun dengan produktivitas yang rendah, sektor ini menampung 50% tenaga kerja yang tidak berupah dan bekerja di bawah 35 jam kerja seminggu atau digolongkan sebagai setengah penganggur.

Pola pertanian di NTT selama ini masih sangat tradisional sehingga tidak memberikan nilai tambah ekonomi, maka perlu pergeseran pola pertanian NTT agar berorientasi pada nilai tambah ekonomi dengan perlahan-lahan mengubah pola pertanian tradisional menjadi pola pertanian yang berorientasi pada pertanian agribisnis dan agroindustri. Hal ini dapat dilakukan agar meningkatkan produktivitas pertanian dan menggeser pekerja dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan.

## **Perkembangan Sektor Industri Pengolahan di NTT**

Provinsi NTT masih berusaha untuk menyelesaikan masalah mendasar yaitu menangani kemiskinan. Sementara untuk tujuan lainnya yaitu: mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS,

malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian lingkungan hidup, serta membangun kemitraan global untuk pembangunan masih belum nampak hasilnya di masyarakat. Hal tersebut terlihat dari indeks pembangunan manusia NTT pada tahun 2013 sebesar 68,77 dibandingkan dengan indeks pembangunan manusia secara nasional sebesar 73,81 sehingga NTT berada di posisi ke 32 dari 34 provinsi di Indonesia dengan angka harapan kecukupan pangan sebesar 2.100kl/orang dapat terwujud.

Berbagai regulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah NTT juga sangat dibutuhkan khususnya untuk kemudahan investasi yang diarahkan ke NTT baik oleh investor asing maupun domestik sesuai potensi yang dimiliki daerah. Disamping alokasi anggaran yang cukup untuk mendanai berbagai program percepatan pembangunan di NTT. Terdapat 32 NGO/LSM Internasional yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di NTT dan 10 NGO Internasional diantaranya bergerak dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta 222 LSM/Yayasan lokal yang tersebar di 21 kabupaten/kota (Bappeda NTT, 2012), dan pada tahun 2016 menurun menjadi 24 Lembaga Mitra, baik itu Bilateral, Multilateral maupun NGO (Bappeda NTT, 2016).

Kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur selama ± 10 tahun yaitu dari tahun 2005 s/d 2014 berada di antara 1 % s/d 1,64 % dengan grafik yang naik turun dan terus menurun di mana pada tahun 2014 menyentuh angka 1,23%. Hal ini juga memberikan gambaran kondisi industri kecil pengolahan yang kurang lebih sama, karena prosentasi terbesar ± 80 % dari industri pengolahan adalah industri kecil.

Jumlah unit usaha dan tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 1.7 di bawah ini :

Tabel . 1.7  
JUMLAH UNIT USAHA, TENAGA KERJA  
SEKTOR INDUSTRI

TAHUN	$\Sigma$ UNIT USAHA	$\Sigma$ TENAGA KERJA
2004	69.041	107.582
2005	69.852	126.452
2006	70.203	148.984
2007	70.628	165.430

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov NTT.

Berbagai sumber daya yang dimiliki daerah ini selain sumber daya manusia juga sumber daya alam yang besar, baik komoditi hasil perkebunan, kehutanan maupun pertambangan belum diolah di dalam daerah, hal ini terlihat dari kegiatan industri yang minim, pemenuhan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Timur prosentase terbesar diperoleh dengan mengkonsumsi berbagai produk yang diproduksi di luar daerah NTT.

Pelaku usaha di sektor industri sangat terbatas, baik dalam jumlah unit usaha maupun kapasitas usaha, khususnya untuk industri sedang dan besar, investor yang melakukan investasi di bidang industri dalam skala tersebut prosentase terbesar berasal dari luar daerah NTT, di sisi lain pelaku usaha skala kecil dan mikro didominasi oleh pelaku usaha dalam daerah.

Kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi NTT berasal dari industri menengah dan industri kecil yang lebih didominasi oleh industri kecil mikro/industri rumah tangga, yang tersebar tidak merata di berbagai daerah dengan komposisi tertinggi di Kota Kupang.

Daya beli masyarakat yang tergantung pada pendapatan aparatur sipil negara yang tetap walau relatif rendah, dapat dikatakan bahwa konsumen terbesar adalah dari aparatur sipil negara dan dengan demikian ketergantungan yang besar pula pada anggaran pemerintah yang mendorong bergeraknya dunia usaha di NTT.



Kondisi ini menggambarkan hubungan yang signifikan antara pertumbuhan industri pengolahan dengan tingkat konsumsi masyarakat. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan sektor industri pengolahan dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan baik di level provinsi maupun kabupaten/kota yang mengacu pada pola pengembangan industri secara nasional di bawah Kementerian Perindustrian.

Kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan yang termuat dalam rencana pengembangan industri yang dijabarkan lebih lanjut dalam program kerja dan pelaksanaan kegiatan diberlakukan sama di seluruh Indonesia tanpa melihat kondisi daerah masing – masing yang berbeda, contohnya: model pengembangan sentra industri di daerah lain bisa berhasil, namun di NTT belum berhasil karena kendala budaya dan sosiologis masyarakat yang berbeda dan sulit berusaha bersama dalam satu kelompok.

Kegiatan industri yang merupakan aktivitas masyarakat dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat dan didukung oleh kondisi geografis. Di Provinsi NTT terdapat kurang lebih 17 suku bangsa (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTT, 2013) umumnya melakukan kegiatan pada sektor pertanian dan bukan sektor industri.

Keseragaman pola pengembangan industri yang dilakukan pemerintah pusat yang diterima industri kecil pengolahan, namun bersifat instan, tidak bertahan lama sehingga pelaksanaan dilapangan yang sifatnya jangka panjang tidak berhasil, di mana selesai program selesailah juga, dan kembalilah industri kecil itu pada kondisi/pola lamanya.

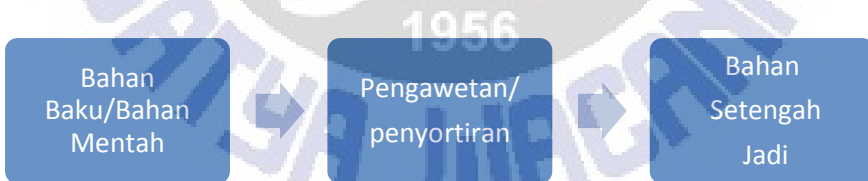
Dampak dari pembinaan pemerintah yang tidak bertahan lama pada industri kecil pengolahan membuat usaha ini tidak berkembang secara baik bahkan berhenti walaupun tetap terdata di instansi pemerintah atau disebut usaha “papan nama” saja. Apalagi pemerintah belum melakukan evaluasi industri kecil yang masih menjalankan usahanya atau sudah tidak lagi, dan memperbaiki data jumlah usaha tersebut secara rutin untuk memperoleh *data base* yang *up to date*.

Sasaran program pembinaan belum pada sektor sekunder, masih pada sektor primer disebabkan karena tujuan dari pembinaan sering ditumpangi tujuan lain yang bersifat politis, di mana sektor primer yang mendominasi di kawasan Timor Barat memiliki anggota masyarakat dalam jumlah terbesar yaitu petani dan nelayan yang bila dibina akan memberikan dampak perolehan suara pada pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota pada periode berikutnya. Berbeda dengan provinsi lain, di mana usaha industri menjadi sasaran pembinaan karena kapasitas usaha pada skala menengah dan atas yang memiliki tenaga kerja/buruh dalam jumlah besar.

Kondisi industri kecil di NTT pada umumnya hampir sama yaitu dengan pola industri yang sangat sederhana, dari bahan mentah/baku ke bahan setengah jadi. Bentuk yang paling sederhana adalah setelah panen dibersihkan, dan bagi bahan pangan dilakukan pengawetan dengan memberi garam dan atau gula untuk memperpanjang daya tahan bahan mentah/bahan baku tersebut, bagi pengolahan nonpangan setelah dibersihkan dibuat bahan setengah jadi/gelondongan terutama hasil hutan, tambang.

Diagram proses industri di NTT umumnya seperti nampak pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1 Proses Industri Sederhana di NTT



Semua proses masih dilakukan dengan sangat sederhana sehingga nilai tambah yang diterima masyarakat sangat rendah. Secara sederhana penulis dapat membagi sektor industri pada kabupaten/kota mana yang masuk pada klasifikasi A, B, C, dan D, berdasarkan beberapa kriteria: misalnya jumlah unit usaha, kapasitas produksi, jumlah investasi, lamanya berusaha.

Pemerintah provinsi NTT maupun kabupaten/kota di kawasan Timor Barat belum melakukan pembinaan pengembangan sektor industri pengolahan berdasarkan teori pengembangan yang berhasil dilakukan di berbagai negara di dunia dan kebijakan pengembangan sektor industri pengolahan yang sudah dilaksanakan oleh beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Thailand, Korea Selatan, Taiwan, Philipina, Malaysia, dan Bangladesh. Begitu juga pemerintah provinsi dan kabupaten / kota di kawasan Timor Barat juga belum melaksanakan kegiatan pemberdayaan sesuai teori pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan provinsi lainnya di Indonesia.

## Identifikasi Masalah

Rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB NTT turut menyumbang pada masih tingginya angka kemiskinan yang dialami masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Perkembangan sektor industri pengolahan dan kontribusinya terhadap PDRB NTT selama 10 tahun yaitu dari tahun 2004 s/d 2013 tidak melampaui 2 % hanya berada di antara 1,63 %, 1,63%, 1,62%, 1,58%, 1,51%, 1,50%. 1,50%, 1,51%, 1,50%, 1,46% dan terus menurun di tahun 2014 pada angka 1,24% dan tahun 2015 pada angka 1,23% (BPS NTT. Berita Resmi Statistik, 2016).

Perkembangan sektor ekonomi NTT mengalami banyak tantangan/hambatan dan membutuhkan strategi yang tepat. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak digerakkan oleh kondisi aktivitas masyarakat, sehingga fondasi ekonomi tidak kuat untuk jangka menengah dan panjang.

Angka kemiskinan sulit untuk diturunkan dalam prosentase besar. Kondisi ini menandakan adanya masalah pelaksanaan program pembangunan di daerah NTT.

Tekad Pemerintah NTT untuk keluar dari kondisi tersebut tidak dibarengi dengan program pembinaan yang menyentuh akar

permasalahan dalam pengembangan sektor industri pengolahan sebagai sektor yang bisa mengubah struktur ekonomi daerah.

## **Batasan Masalah**

Jika diruntut dapat dikatakan bahwa, akar permasalahan terletak pada pelaku program pembinaan untuk pengembangan sektor industri pengolahan yang belum tepat dalam merancang dan melaksanakan program sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dialami oleh usaha kecil di sektor industri pengolahan.

Permasalahan berikutnya adalah bahwa program pembinaan dalam upaya pengembangan sektor industri pengolahan yang sudah keliru dibuat juga tidak tepat sasaran sehingga tingkat keberhasilan program menjadi semakin rendah.

## **Perumusan Masalah Penelitian**

Permasalahan penelitian adalah bahwa industri kecil sektor pengolahan belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemberdayaan ekonomi rakyat di kawasan Timor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Masalah utama penelitian yang menjadi inti dari penelitian ini beranjak dari kondisi empirik dan dukungan data sekunder daerah yang memberikan gambaran minimnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap ekonomi daerah yang berdampak pada rendahnya berbagai aspek terkait kondisi masyarakat dan daerah. Pertanyaan penelitian utama ini dijabarkan dalam dua pertanyaan penelitian sbb :

- 1) Mengapa penyerapan program pengembangan industri kecil sektor pengolahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat bagi pengembangan sektor industri pengolahan di kawasan Timor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur rendah?

- 2) Apa dampak pengembangan sektor industri pengolahan terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat di kawasan Timor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur?

## **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah

1. Mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang berbagai faktor yang mendorong dan menghambat penyerapan program pengembangan industri kecil pengolahan dan program pemberdayaan ekonomi rakyat untuk pengembangan industri pengolahan di kawasan Timor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Mengetahui dampak pengembangan industri kecil pengolahan di kawasan Timor Barat dan solusi pengembangan industri kecil pengolahan bagi pemberdayaan ekonomi rakyat di kawasan Timor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Manfaat penelitian adalah mendapatkan solusi untuk menekan angka kemiskinan melalui peningkatan ekonomi rakyat dengan melaksanakan program pengembangan industri kecil pengolahan dan sekaligus pemberdayaan ekonomi rakyat.

## **Sistematika Disertasi**

Secara garis besar struktur disertasi terbagi atas 8 bab sbb :

Pada Bab I, penulis mengemukakan tentang mengapa penulis tertarik dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengembangan industri pengolahan di kawasan Timor Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan keprihatinan penulis dengan kondisi-kondisi real daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat, dan pertanyaan penting yang harus dijawab adalah bagaimana daerah tersebut bisa bertahan di masa yang akan datang dan mencapai tujuan

sebagai bagian dari bangsa Indonesia dalam bingkai Negara Republik Indonesia bila persoalan-persoalan tidak diupayakan penyelesaiannya.

Selanjutnya pada Bab II, penulis menyampaikan berbagai referensi dan tinjauan pustaka terkait penulisan ini yaitu dasar kebijakan terkait pengembangan industri, berbagai teori dan model yang relevan terkait permasalahan dan penelitian terdahulu, serta gambaran umum penelitian.

Pada Bab III, memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan pada Bab IV dapat dilihat secara utuh gambaran umum wilayah penelitian dan kondisi industri kecil pengolahan secara lengkap, serta kebijakan pemerintah terkait industri kecil pengolahan.

Di Bab V penulis mengangkat tentang kebijakan pengembangan industri kecil pengolahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur baik itu kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pada Bab VI, penulis mengemukakan dampak yang diperoleh industri kecil pengolahan dari berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah, dan pada Bab VII penulis mengemukakan analisis kebijakan pemerintah terkait menjawab permasalahan dalam pengembangan industri kecil pengolahan di kawasan Timor Barat.

Terakhir pada Bab VIII penulis mengambil kesimpulan tentang penelitian ini dan memberi rekomendasi terkait pengembangan industri kecil pengolahan di kawasan Timor Barat, menyatakan saran-saran terkait implikasi teoritis serta implikasi kebijakan dan usulan penelitian selanjutnya.